



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Sumber Daya SKPD	2
BAB II	5
A. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan	5
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Program dan Kegiatan	9
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Perjanjian Kinerja	11
E. Anggaran	13
BAB III	14
A. Pengukuran Kinerja	14
B. Capaian Kinerja	15
C. Realisasi Anggaran	17
D. Penutup	19

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja selama tahun 2020 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020. LAKIP BPKAD Tahun 2020 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tugas yang diemban.

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat Tahun 2020 terdiri atas 6 (enam) program yang dijabarkan dalam 40 (empat puluh) kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - k. Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi umum dengan capaian indikator kinerja *output* sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - d. Kegiatan Pengadaan mebeleur dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala bangunan fasilitas umum dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dicapai melalui :
 - a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

-
- b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Verifikasi RKA/DPA-SKPD dan Perubahan RKA/DPPA SKPD dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dicapai melalui :
- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - g. Kegiatan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - h. Kegiatan Peningkatan manajemen asset/barang daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - i. Kegiatan Revaluasi/Appraisal asset/barang daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - j. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - k. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - l. Kegiatan Rekonsiliasi Kas Daerah, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

-
- m. Kegiatan Penyusunan laporan data gaji, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;
 - n. Kegiatan Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD, dengan capaian indikator kinerja output sebesar 100% dari target yang ditetapkan;

Meski beberapa program secara kuantitatif telah tercapai, namun secara kualitatif masih perlu peningkatan kualitas untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Rencana Kerja yang ditetapkan. Hal ini terlihat pada perumusan program-program kerja pada tahun mendatang perlu lebih disempurnakan lagi agar indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada BPKAD Kabupaten Langkat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Stabat,

2021

KEPALA BPKAD KABUPATEN LANGKAT



Drs. M. ISKANDARSYAH
NIP. 19660904 198603 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat di pimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang membawahi beberapa subbagian/sub bidang yaitu :

1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Administrasi Anggaran
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung
4. Bidang Verifikasi dan Pembukuan
 - a. Sub Bidang Verifikasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

5. Bidang Asset daerah terdiri dari :
- Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Mlik Daerah.

B. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPKAD Kabupaten Langkat didukung oleh sumber daya manusia aparatur per 30 Desember 2020 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 34 (tiga puluh empat) orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian berdasarkan jumlah personil

No	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	7	5	8	7
3	Bidang Anggaran	-	-	1	-	2	-	2	6	5	6
4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	-	1	1	7	5	9	6
5	Bidang Verifikasi dan Pembukuan	-	-	1	-	-	2	1	3	2	5
6	Bidang Asset Daerah	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1
7	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	20	14	20	14
	Jumlah	1	-	5	-	4	6	36	38	48	39

Rincian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Bidang Tugas	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	-	-	8	2	10
5	Staf Pelaksana	-	-	6	1	29	1	37
6	Tenaga Kontrak	-	3	16	1	14	-	34
	Jumlah	-	3	21	4	53	3	87

Rincian berdasarkan golongan ruang

No	Bidang Tugas	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	10	-	10
5	Staf Pelaksana	-	5	29	3	37
6	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	34
	Jumlah	-	5	41	7	87

Rincian berdasarkan Diklat

No	Bidang Tugas	Diklat PIM			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	2	2
5	<i>Belum mengikuti Diklat PIM</i>	1	5	8	14
6	Staf Pelaksana	-	-	-	-
	Jumlah	1	6	13	20

b. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor.

Kantor BPKAD saat ini terletak pada Jalan Khairil Anwar Stabat.

2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 17 (tujuh belas) unit, terdiri dari :

1. Toyota kijang tahun 1996 BK 907 P
2. Toyota kijang tahun 1996 BK 948 P
3. Toyota kijang tahun 1996 BK 957 P
4. Toyota kijang tahun 1996 BK 942 P
5. Toyota kijang tahun 1997 BK 903 P
6. Isuzu/Panther tahun 1997 BK 804 P
7. Daihatsu tahun 2001 BK 960 P
8. Toyota kijang tahun 2002 BK 171 P
9. Panther tahun 2002 BK 1649 GE
10. Toyota kijang tahun 2003 BK 4 P
11. Panther tahun 2003 BK 1752 GH

12. Jaguar tahun 2003 B 8659 BS
13. Toyota kijang tahun 2006 BK 956 P
14. Toyota Kijang innova G tahun 2008 BK 277 P
15. Toyota Kijang innova E tahun 2008 BK 3 P
16. Kijang innova tahun 2011 BK 1076 P
17. Toyota Hi-lux tahun 2012 BK 8378 P
18. Toyota All New Rush tahun 2018 BK 1660 P

- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 12 (dua belas) unit, terdiri dari :

1. Honda legenda tahun 2002 BK 6943 P
2. Yamaha tahun 2004 BK 3002 P
3. Yamaha tahun 2007 BK 2223 P
4. Yamaha tahun 2007 BK 2242 P
5. Yamaha tahun 2007 BK 2325 P
6. Yamaha tahun 2008 BK 2359 P
7. Yamaha tahun 2008 BK 2323 P
8. Yamaha tahun 2008 BK 2331 P
9. Yamaha tahun 2010 BK 2574 P
10. Yamaha tahun 2010 BK 2573 P
11. Yamaha Vega 2 RD tahun 2010 BK 2575 P
12. Yamaha Vega 2 RD tahun 2012 BK 2637 P
13. Yamaha Vega 2 RD tahun 2012 BK 2638 P

3. Fasilitas

Fasilitas lainnya berupa, meja kerja pegawai, meja komputer, kursi kerja, kursi tamu, komputer, laptop, AC serta fasilitas lainnya guna mendukung kerja pada BPKAD Kab. Langkat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Langkat pada akhir periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih.

A. Visi

Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat

Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

B. MISI

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan

Kabupaten Langkat sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
- 2) Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
- 4) Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
- 5) Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Langkat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024, maka BPKAD Kabupaten Langkat melaksanakan perwujudan dari Misi kelima yaitu "**Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**".

C. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat menetapkan tujuannya sebagai berikut :

No	MISI	TUJUAN
1.	Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat.

Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, maka disusun strategi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dengan prioritas agenda sebagai berikut :

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Penentuan kebijakan dapat mempertajam strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dalam mendukung strategi pelaksanaannya dengan melakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

Kebijakan yang akan diterapkan pada Renstra sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
Misi : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK
		Pengoptimalan pendataan dan pengelolaan aset daerah
		Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelesaian laporan keuangan
		Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan Peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yaitu :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Keuangan Daerah									
1	Persentase perangkat daerah yang dokumen keuangannya selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang laporan asset/barang daerahnya diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase laporan perangkat daerah capaian kinerjanya terbit tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

C. PROGRAM dan KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2020 direncanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
BELANJA LANGSUNG	11.835.828.482
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.096.728.329
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.539.992
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	221.428.567
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	137.009.030
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	133.340.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.800.680
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.969.460
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.750.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	41.800.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	959.500.000
Penyediaan Jasa Administrasi Umum	1.153.590.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.934.297.978
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	900.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	47.494.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	230.660.578
Pengadaan Mebeleur	33.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	350.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.553.400
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	56.690.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Fasilitas Umum	65.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	133.400.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	55.200.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	78.200.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	523.401.925
Pendidikan dan Pelatihan Formal	335.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	188.401.925
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.369.812.780
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	219.458.760
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	639.210.570
Verifikasi RKA/DPA-SKPD dan Perubahan RKA/DPPA SKPD	511.143.450
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	4.778.187.470
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	844.414.370
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	414.636.407

Program/Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	791.090.665
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	235.757.590
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	438.614.240
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	97.461.050
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	433.576.494
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	293.344.322
Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah	56.281.187
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	512.072.255
Penyelesaian Kerugian Daerah	200.019.610
Rekonsiliasi Kas Daerah	282.561.200
Penyusunan Laporan Data Gaji	166.416.325
Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD	11.941.755

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)/PERJANJIAN KINERJA

Rencana kinerja atau perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja Tahunan atau perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Tahunan/perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan
1.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
			Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Makanan dan Minuman
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
			Penyediaan Jasa Administrasi Umum
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			Pengadaan Mebeleur
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Fasilitas Umum
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Pendidikan dan Pelatihan Formal
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Verifikasi RKA/DPA SKPD dan Perubahan RKA/DPPA SKPD
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
			Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			Penyelesaian Kerugian Daerah
			Rekonsiliasi Kas Daerah
			Penyusunan Laporan Data Gaji
			Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD

E. ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2020 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 449.273.555.738,86 dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 19.120.600.00,- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 437.437.727.256,86 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.469.068.000,- Belanja Hibah sebesar Rp. 20.284.591.322,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 11.938.038.004,- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 4.134.270.142,- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 330.562.622.200,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 64.049.137.588,86 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.835.828.482,-. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.574.248.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.929.525.904,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 332.054.578,-

BAB III PENGUKURAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat. Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat mencakup penetapan proyeksi / target **indikator kinerja** atas program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam tahun 2020.

b. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2020 dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan pada saat penyusunan LAKIP dengan memanfaatkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan BPKAD Kabupaten Langkat.

c. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

d. Hasil Pengukuran Kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Langkat tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan pencapaian kinerja dari sasaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum BPKAD Kabupaten Langkat telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja program utama. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja program utama yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat tahun 2020 dengan realisasinya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah.

a. Capaian sasaran

Indikator sasaran dari sasaran "Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" adalah : "Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah".

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran "Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" antara tahun sebelumnya dengan tahun laporan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				
		2019		2020		
		Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah tepat waktu dan tercapainya opini yang baik atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

b. Realisasi Perjanjian Kinerja

Dalam mewujudkan capaian sasaran "Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Dilakukan evaluasi dengan memperbandingkan antara target dan realisasi setiap kegiatan adalah sebagai berikut :

Kegiatan				Realisasi	%
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
Tersedianya LKPJ	Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten serta terlaksananya implementasi/ penerapan SIMDA BMD	Tahun	100	100	100

Perjanjian kinerja untuk sasaran "Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" terdiri dari 1 program antara lain : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Serta 2 kegiatan yang capaian kinerjanya rata-rata 100%

c. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dari sasaran "Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja SKPD dan Kabupaten serta terlaksananya implementasi/ penerapan SIMDA BMD	100	100	100

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Selama periode Tahun Anggaran 2020, BPKAD Kabupaten Langkat menerima anggaran belanja sebesar Rp. 449.273.555.738,86 yang terdiri dari Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 437.437.727.256,86 dan belanja langsung sebesar Rp. 11.835.828.482,-.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 414.283.186.268,39 atau 92,21% dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	2.032.785.955.762,00	1.981.056.890.142,88	(51.729.065.619,12)	97,46
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.120.600.000,00	27.215.741.010,88	8.095.141.010,88	142,34
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	72.600.000,00	40.100.000,00	(32.500.000,00)	55,23
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.950.000.000,00	8.730.147.444,00	(1.219.852.556,00)	87,74
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.098.000.000,00	18.445.493.566,88	9.347.493.566,88	202,74
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.682.438.370.762,00	1.623.324.864.132,00	(59.113.506.630,00)	96,49
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.574.057.794.005,00	1.537.931.438.606,00	(36.126.355.399,00)	97,70
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	153.865.651.633,00	113.126.902.259,00	(40.738.749.374,00)	73,52
4.2.1.2	Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam	5.359.284.082,00	6.140.119.328,00	780.835.246,00	114,57
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.099.658.531.000,00	1.099.658.531.000,00	-	100,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	315.174.327.290,00	319.005.886.019,00	3.831.558.729,00	101,22
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya	12.506.607.000,00	12.506.607.000,00	-	100,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	12.506.607.000,00	12.506.607.000,00	-	100,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah -Lainnya	95.873.969.757,00	72.886.818.526,00	(22.987.151.231,00)	76,02
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	88.152.062.721,00	69.224.821.821,00	(18.927.240.900,00)	78,53
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.721.907.036,00	3.661.996.705,00	(4.059.910.331,00)	47,42
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	331.226.985.000,00	330.516.285.000,00	(710.700.000,00)	99,79
4.3.1	Pendapatan Hibah	122.607.400.000,00	121.896.700.000,00	(710.700.000,00)	99,42
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	208.619.585.000,00	208.619.585.000,00	-	100,00
	Jumlah	2.032.785.955.762,00	1.981.056.890.142,88	51.729.065.619,12	97,46
5	BELANJA	113.705.372.074,86	78.715.002.604,39	(34.990.369.470,47)	69,23
5.1	BELANJA OPERASI	49.324.179.908,00	42.907.316.588,99	(6.416.863.319,01)	86,99
5.1.1	Belanja Pegawai	7.072.306.000,00	5.901.001.461,00	(1.171.304.539,00)	83,44
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.535.904,00	9.021.415.127,99	(1.879.120.776,01)	82,76
5.1.5	Belanja Hibah	19.413.300.000,00	17.889.600.000,00	(1.523.700.000,00)	92,15
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.938.038.004,00	10.095.300.000,00	(1.842.738.004,00)	84,56
5.2	BELANJA MODAL	332.054.578,00	310.519.000,00	21.535.578,00	93,51
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	312.054.578,00	290.519.000,00	(21.535.578,00)	93,10
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	64.049.137.588,86	35.497.167.015,40	28.551.970.573,46	55,42

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	64.049.137.588,86	35.497.167.015,40	(28.551.970.573,46)	55,42
6	TRANSFER	335.568.183.664,00	335.568.183.664,00	-	100,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.134.270.142,00	4.134.270.142,00	-	100,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	331.433.913.522,00	331.433.913.522,00	-	100,00
	Jumlah	449.273.555.738,86	414.283.186.268,39	(34.990.369.470,47)	92,21
	Surplus/(Defisit)	1.583.512.400.023,14	1.566.773.703.874,49	(16.738.696.148,65)	98,94
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	-	100,00
7.1.1	Penggunaan SiLPA	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	-	100,00
	Jumlah	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	-	100,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.362.960.884,00	7.362.960.884,00	-	100,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.362.960.884,00	7.362.960.884,00	-	100,00
	Jumlah	7.362.960.884,00	7.362.960.884,00	-	100,00
	Pembiayaan Neto	257.575.963.312,36	257.575.963.312,36	-	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.841.088.363.335,50	1.824.349.667.186,85	(16.738.696.148,65)	99,09

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja suatu Instansi Pemerintah di Kabupaten Langkat yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan instropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Langkat pada Tahun 2020 melalui 40 (empat puluh) kegiatan berada dalam skala pencapaian kinerja rata-rata 100%.

Tinjauan umum dan tinjauan khusus sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi refleksi obyektif atas kondisi kinerja BPKAD Kabupaten Langkat dan menjadi cermin sekaligus cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kiranya LAKIP 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Langkat. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (***Operational Plan***), Rencana Kinerja (***Performance Plan***), Rencana Anggaran (***Strategic Plan***) pada masa mendatang.